

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum peneliti meneliti lebih jauh peneliti akan mengkaji terlebih dahulu masalah dan objek penelitian yang akan diteliti. Tujuannya untuk menambah wawasan peneliti dan peneliti dapat memahami secara mendalam masalah dan objek penelitian. Adapun hasil penelitian terdahulu yang relevan sebagai berikut:

1. Yayang Prili Wandari, dengan judul “Peran Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Medan dalam Meningkatkan Profesionalisme Jurnalis di Kota Medan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, AJI Kota Medan telah menjalankan perannya dengan baik, khususnya dalam hal meningkatkan profesionalisme jurnalis. Adapun peran AJI Kota Medan yaitu, sebagai wadah untuk meningkatkan keterampilan jurnalis, dan sebagai wadah untuk menguasai bidang liputan, serta sebagai wadah bagi jurnalis untuk memahami dan mematuhi kode etik jurnalistik melalui beberapa program yang dilaksanakan seperti pelatihan dan sertifikasi. Beberapa faktor penghambat AJI Kota Medan dalam meningkatkan profesionalisme jurnalis diantaranya persoalan biaya, tanggung jawab anggota AJI masing-masing di tempat kerjanya, latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, jumlah kuota yang terbatas saat mengadakan kegiatan, kesejahteraan jurnalis yang masih rendah dan memiliki kedekatan emosional dengan narasumber. Di sisi lain, bekerja sama dengan pihak-pihak *NonGovernment Organization* (NGO) dan lembaga-lembaga

pendidikan merupakan hal yang mendukung AJI Kota Medan dalam hal meningkatkan profesionalisme jurnalis.³

2. Udin Rumbati, dengan judul “Peran Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Dalam Menegakan Independensi Media di Ambon”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota Aliansi Jurnalis Independen dari berbagai perusahaan media tempat mereka bekerja, ternyata memiliki peran penting terhadap independensi wartawan dalam membuat berita. Pendapatan yang mereka terima dari hasil kerja wartawan rupanya jauh dari kata cukup untuk kebutuhan hidup mereka terutama yang sudah berkeluarga. Hal ini menyebabkan para jurnalis melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mulai dari mencari pekerjaan sampingan sampai menerima pemberian dari narasumber. Dari hal tersebut ternyata dapat mengganggu independensi seorang wartawan.⁴
3. Muliani Sengan, dengan judul “Peran Wartawan Ambon Ekspres Dalam Menegakan Independensi Media Di Ambon”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, wartawan Ambon Ekspres memiliki peranan penting terhadap penegakan independensi median dengan menyajikan berita selalu berimbang berdasarkan fakta yang terjadi. Wartawan Ambon Ekspres dikenakan sanksi berupa teguran secara lisan dan tertulis, diberikan skorsing atau hukuman

³ Yayang Prili Wandari, Peran Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Medan Dalam Meningkatkan Profesionalisme Jurnalis di Kota Medan, *Skripsi*, (Universitas Sumatera Utara: 2021).

⁴ Yayang Prili Wandari, Peran Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Medan Dalam Meningkatkan Profesionalisme Jurnalis di Kota Medan, *Skripsi*, (Universitas Sumatera Utara: 2021).

berupa sanksi tegas lain berupa pemberhentian dari jabatannya sebagai wartawan.⁵

Persamaan penelitian penulis dengan tiga penelitian relevan di atas, adalah sama-sama meneliti tentang AJI dalam menegakan Independensi Wartawan maupun Media. Serta menggunakan metode penelitian yang sama, yaitu metode penelitian kualitatif. Yang membedakan penelitian penulis dengan tiga penelitian terdahulu adalah penelitian peneliti lebih fokus tentang Implementasi Program Kerja AJI, fungsi dan tanggung jawab AJI Provinsi Maluku dalam Meningkatkan Profesionalisme Wartawan di Kota Ambon.

B. Kajian Teori

1. Teori Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Dalam KBBI kata implementasi memiliki arti pelaksanaan, penerapan.⁶ Implementasi juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk melaksanakan suatu kebijakan yang dituangkan dalam suatu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun lembaga negara lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang dituangkan dalam tujuan tersebut.) Sedangkan menurut Edi Suharto, implementasi merupakan salah satu rangkaian dalam perumusan pembuatan suatu kebijakan yaitu identifikasi, implementasi, dan evaluasi.⁷

⁵ Muliani Sengan, *Peran Wartawan Ambon Ekspres Dalam Menegakan Independensi Media di Ambon, Skripsi*, (IAIN Ambon: 2021).

⁶ www.kkbi.id/implementasi (Diakses pada tanggal 17 Mei 2024)

⁷ Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengakaji Masalah Dan Kebijakan Sosial*, (Bandung: Alfabeta, 2012) h.78.

Jika sebuah program telah ditetapkan, maka proses perumusan kebijakan selanjutnya adalah tahapan implementasi. Selanjutnya Freeman dan Sherwood mengembangkan tahapan proses pembuatan kebijakan sosial menjadi empat tahapan, yaitu: perencanaan kebijakan, pengembangan, implementasi program, dan evaluasi.⁸

Menurut Erwan Agus dan Dyah Ratih implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to delivery output) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul ketika policy output dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan.⁹

b. Tahapan Implementasi

Tujuan kebijakan akan dapat terwujud dengan baik apabila implementasi kebijakan dan perumusan atau pembuatan kebijakan harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik. Dalam suatu implementasi kebijakan sangat diperlukan suatu tahapan-tahapan dalam proses implementasi agar tujuan dari suatu kebijakan tersebut dapat terwujud. Joko Widodo dalam bukunya yang mengutip dari Darwin menyebutkan bahwa hal-hal yang penting yang harus dilakukan dalam proses implementasi yaitu: pendayagunaan sumber, keterlibatan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, interpretasi,

⁸ Ibid. h. 78

⁹ Erwan Agus Dan Diah Rati, *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*, (Yogyakarta, Gava Media, 2012), h. 21

manajemen program, dan penyediaan layanan dan manfaat pada publik.¹⁰

2. Tinjauan Jurnalistik

a. Sejarah Jurnalistik

Sejarah jurnalistik pada dasarnya sudah membentang sepanjang peradaban manusia. Semenjak manusia mengenal peradaban, maka semenjak itu pula diketahui akar jurnalistik dalam bentuk yang sangat sederhana tentunya. Akar dari jurnalistik itu sendiri dari masa ke masa bisa dilihat dari informasi berupa pahatan atau coretan pada dinding batu dan goa-goa, selain itu, informasi yang menjadi akar jurnalistik itu juga bisa dilihat pada tulisan daun-daunan yang merupakan hasil peradaban manusia.

Shirley Biagi dalam bukunya *Media Impact: An Introduction to Mass Media*, menuliskan bahwa informasi komunikasi sudah mulai pada 3.500 tahun sebelum Masehi, ketika ditemukan grafis-grafis gambar yang dipahatkan manusia pada batu. Selanjutnya, pada tahun 2.500 tahun sebelum Masehi, bangsa Mesir menemukan daun lontar (*papyrus*) untuk ditulis berbagai informasi.¹¹

Menurut Biagi, 1.000 tahun sebelum Masehi terjadi revolusi informasi komunikasi pertama dengan dimulainya penulisan fenotik. Setelah itu, 200 tahun sebelum Masehi bangsa Yunani menyempurnakan perkamen (kertas dari kulit). Seratus tahun sebelum Masehi, bangsa China mulai menemukan kertas dan memanfaatkannya untuk berbagai kegiatan komunikasi.

¹⁰ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Public Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Public*, (Malang, Bayumedia Publisher, 2012), h. 89

¹¹ Azwar, *4 Pilar Jurnalistik Pengetahuan Dasar Belajar Jurnalistik*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h.6-8

Selanjutnya dalam buku Biagi itu dapat dilihat perkembangan kronologis komunikasi yang merupakan induk perkembangan jurnalistik itu. Pada tahun 1300 bangsa Eropa mulai menggunakan kertas untuk kegiatan komunikasi. Pada 1445 bangsa China menciptakan mesin cetak tembaga. Selanjutnya Biagi menuliskan, pada 1455 terjadi revolusi informasi komunikasi kedua dengan ditemukannya mesin cetak bergerak. Pada 1640 bangsa Amerika pertama kali menerbitkan buku.

Biagi menjelaskan, bahwa pada 1690 Amerika Serikat pertama kali menerbitkan surat kabar. Pada 1741 Amerika Serikat menerbitkan majalah pertama di negeri itu. Sementara itu, gramofon. Pada 1899 Guglielmo Marconi pertama kali menggunakan radio tanpa kabel. Pada 1927, *The Jazz Singer*, film layar lebar pertama dengan suara tayang perdana di New York. Pada 1939 TV NBC tayang perdana dengan Gelanggang Dunia New York. Saat itu dipamerkan juga televisi berukuran 5 inci dan 9 inci dengan harga mulai \$199,50 hingga \$600.

Dari gambaran tersebut, dapat dilihat bahwa akar jurnalistik itu sudah sangat lama. Hingga sekarang dimana media sudah berganti-ganti, dari cetak hingga maraknya internet, kegiatan jurnalistik tetap ada ia menyesuaikan diri dengan media-media baru yang bermunculan pada zamannya hingga sekarang. Kita tidak dapat pungkiri bahwa setiap sudut kehidupan manusia tidak terlepas dari jurnalistik.¹²

Sejarah mengungkap sebuah kecenderungan penting lain. Makin demokratis sebuah masyarakat, makin berita dan informasi yang didapatkan. Saat masyarakat menjadi lebih demokratis untuk pertama kalinya, mereka condong melakukan

¹² Tom E. Rolnicki dan C. Dow Tete, *Pengantar Dasar Journalisme (Scholistic Journalism)*, (Jakarta: Kencana, 2008), h.1

sesuatu yang bersifat prajurnalisme. Yunani, tempat demokrasi paling awal, bersandar pada jurnalisme lisan di pasar Athena tempat hampir semua penting tentang urusan publik dibuka untuk umum.

Maka dari itu, apa yang kita anggap sebagai jurnalisme modern mulai muncul pada awal abad ke-17 dan betul-betul lahir dari perbincangan, terutama ditempat publik seperti kafe di Inggris, kemudian di kedai minum. Di Inggris, kafe mengkhususkan diri pada jenis informasi spesifik. Surat kabar muncul dari kefe-kafe ini sekitar 1609, ketika percetakan mulai mengumpulkan berita perkapalan, gossip, dan argument politik dari kafe dan mencetaknya diatas kertas. Dengan evolusi surat kabar pertama, politik Inggris mulai membicarakan sebuah ponomena baru, yang mereka sebut opini pablik. Pada awal abad ke-18, wartawan mulai memformulasikan teori kebebasan berbicara dan pres bebas. Pada 1720, dua orang dari surat kabar London memperkenalkan ide bahwa kebenaran harus bisa menjadi pertahanan melawan pencemaran nama baik.

Sejarah jurnalistik Indonesia pada abad ke-20 ditandai dengan munculnya Medan Prijaji yang didirikan oleh dan modal orang Indonesia, yaitu Tirtohadisuryo, untuk bangsa Indonesia. Mulanya pada 1907, surat kabar ini berbentuk dan baru pada 1910 berubah menjadi harian. Beberapa pejuang kemerdekaan Indonesia menggunakan jurnalistik sebagai alat perjuangan. Di era-era inilah Bintang Timur, Bintang Barat, Java Bode, Medan Prijaji, dan Java Bode terbit. Pada masa Jepang mengambil alih kekuasaan, koran-koran ini dilarang. Akan tetapi, pada akhirnya ada lima media yang mendapat izin terbit: Asia Raja,

Sahaya, Sinar Baru, Sinar Matahari, dan Suara Asia. Kemerdekaan Indonesia membawa berkah bagi kegiatan jurnalistik.¹³

Pada awalnya jurnalistik berperan sebagai satu di antaranya media komunikasi cetak di Indonesia adalah sebagai penyebaran informasi yang dibutuhkan oleh para pejuang kemerdekaan. Seperti yang dilakukan tiga serangkai *Indische Partij*, yaitu Dowses Dekker, Tjipto Mangoenkoesoemo, dan Soewardi pada tahun 1913, didirikannya Bumi Putera untuk menentang rencana pemerintahan kolonial tentang penarikan pajak tanah. Hal yang dilakukan Soewardi saat itu adalah dengan menulis artikel dengan judul “*Als Ik Een Nederlander*” atau “Seandainya Saya Seorang Belanda”.

Selain itu, pemerintahan kolonialisme menggunakan jurnalistik media cetak sebagai alat propaganda penyampaian informasi. *Bataviase Nouvelles* adalah surat kabar cetak yang pertama kali terbit pada era Gubernur Jenderal Gustav Willem Baron von Imhoff, yang diisi oleh berita iklan, lelang, pesta, jamuan, obituari, doa keselamatan bagi kapal yang berlayar jauh, sejarah awal koloni dan sejarah gereja secara singkat.

b. Pengertian Jurnalistik

Jurnalisme secara etimologis berasal dari kata “*journal*”. *Journal* adalah bahasa Prancis untuk catatan atau laporan harian. Kamus Jurnalisme mendefinisikannya sebagai kegiatan memproduksi, menyunting, dan menulis untuk surat kabar, majalah, dan terbitan berkala lainnya. Bahasa Inggris telah mendominasi bahasa ilmu pengetahuan, seperti yang terjadi di Indonesia, namun kata jurnalistik berasal

¹³ Dilansir dari <https://pji.uma.ac.id/index.php/2021/11/08/sejarah-jurnalistik-di-indonesia/> pada 31 Oktober 2023

dari kata jurnalistik bahasa Inggris, yang meliputi penulisan surat kabar dan majalah, atau kegiatan penyiaran berita di radio atau televisi.

Sebagian ulama berasal dari etimologi bahwa istilah jurnalistik terdiri dari dua suku kata: jurnal dan istik. *Jurnal* berasal dari bahasa Perancis *jar*, yang berarti buku harian. Juga dalam bahasa latin adalah kata *diurna*, yang hampir identik dengan jurnal baik secara fonetis maupun fonetis, yang berarti hari ini. Bahkan, di Roma Kuno, ketika Julius Caesar berkuasa, istilah Acta Diurnal dikenal, yang berarti urutan kata, gerakan, aktivitas, atau kejadian sehari-hari.¹⁴

Di sisi lain, kata "*istik*" mengacu pada istilah "estetika" yang berarti ilmu keindahan. Keindahan yang dimaksud adalah berbagai karya seni dan atau kerajinan yang menggunakan bahan-bahan yang diperlukan seperti kayu, batu, kertas, cat, tanah liat, dan lain-lain, termasuk segala jenis bangunan, sastra, musik, yang memiliki nilai seni atau estetika. Oleh karena itu, jurnalisme dapat diartikan sebagai sebuah karya seni berupa kronik peristiwa sehari-hari yang bernilai estetis untuk menarik perhatian pembaca dan pendengar.

Dalam konteks yang lebih luas, jurnalisme diartikan sebagai seni menemukan, mengumpulkan, mengolah, menyunting dan menyajikan secara indah berita tentang peristiwa kehidupan sehari-hari untuk memenuhi segala kebutuhan hati nurani pemirsanya. Sikap, karakter, pendapat dan tindakan yang ditampilkan kepada khalayak sesuai dengan keinginan wartawan.¹⁵

¹⁴ Mahi M. Hikayat, *Jurnalistik Literary Journalism*, (Jakarta Timur, PRENADAMEDIA GROUP:2018), h.88-89

¹⁵ *Ibid.* h.93

c. Kode Etik Jurnalistik

Wartawan di Indonesia secara tertulis diatur dalam kode etik. baik kode etik jurnalistik yang dikeluarkan berdasarkan dewan pers tentang kode etik jurnalistik sebagai peraturan dewan pers, maupun kode etik yang dikeluarkan Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Kode etik jurnalistik adalah etika profesi bagi seorang jurnalis. Etika jurnalistik ini mengatur wartawan agar tidak menyiarkan berita-berita yang berbau pornografi atau informasi cabul. Jurnalis juga diatur agar tidak menerima uang sogok atau suap. Kode etik juga mengharuskan agar wartawan menulis berita yang berimbang.

Sebagai kaum professional, profesi jurnalis atau wartawan sama halnya dengan profesi seorang guru, dokter, pengacara dan profesi lain yang memerlukan keahlian khusus. Oleh sebab itu, wartawan juga harus memiliki kode etik atau lebih dikenal dengan etika profesi. Etika profesi ini menjadi pedoman bagi wartawan atau jurnalis dalam bersikap selama menjalankan tugas profesionalnya. Di luar negeri kode etik juga disebut dengan *code of conduct*. Dalam Undang-Undang Pers pasal 7 ayat (2) UU No. 40 tahun 1999 dinyatakan bahwa, “wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik.” Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kode etik jurnalistik adalah kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh dewan pers.¹⁶

Menurut UU No. 40 tahun 1999 tentang pers, kode etik jurnalistik adalah himpunan etika profesi wartawan. Kode etik adalah pedoman bagi wartawan dalam melaksanakan tugasnya sebagai landasan moral atau etika profesi yang bisa

¹⁶Azwar, M,SI. *4 Pilar Jurnalistik, Pengetahuan Dasar Belajar Jurnalistik*, (Jakarta, PRENADAMEDIA GROUP:2018), h.40-41

menjadi pedoman operasional dalam menegakan integritas dan profesionalitas wartawan.

1. Profesionalisme Wartawan

a. Independensi

Independensi atau Kemandirian adalah watak dan sikap jiwa mandiri yang tidak mau bergantung pada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Arti kemerdekaan juga dapat diartikan sebagai sikap netral atau tidak memihak terhadap seseorang, memiliki kekuatan sendiri, mandiri dan tidak dikendalikan oleh pihak lain (seperti badan independen).

Secara etimologis, kata “mandiri” berasal dari bahasa Inggris. Jadi, mandiri artinya mandiri, mandiri, tidak bergantung pada orang lain, mandiri, berdaulat. Kata kemerdekaan banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti keuangan, profesi, politik dan ekonomi.

Kebebasan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani, termaksud pula memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia paling hakiki dalam rangka menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hak-hak asasi manusia paling hakiki merupakan cerminan kehidupan demokratis suatu bangsa.

Di Indonesia, terutama sejak era reformasi 1998, kehidupan demokratis itu terpantul amat jernih dalam kehidupan pers. Dalam ungkapan lain, pers Indonesia ini telah memiliki kebebasan mengungkapkan pikiran dan pendapat, sebagaimana diamanatkan oleh pasal 28-F UUD 1945 “setiap orang berhak untuk

berkomunikasi dan memperoleh informasi juga mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang ada”.¹⁷

b. Tanggung Jawab

Wartawan profesional harus memiliki kemandirian atau otonomi, tekad dan komitmen, serta kemampuan untuk melaksanakan tugas jurnalistiknya, seperti meneliti, menyiapkan, dan menerbitkan berita sesuai spesifikasi. Dengan kata lain, jurnalis profesional dimintai pertanggungjawaban atas pekerjaannya karena tidak didasarkan pada keinginan pihak luar, tetapi pada pelaksanaan tugas jurnalistiknya.

Darajat Wibawa dalam jurnalnya mengatakan bahwa tanggung jawab jurnalis adalah konsekuensi yang harus mereka terima. Artinya wartawan tidak harus melupakan segala aktivitasnya. Mereka benar-benar perlu didokumentasikan agar kegiatan jurnalis memiliki konsekuensi yang harus ditanggung oleh jurnalis yang terlibat.¹⁸

Pendapat yang dikemukakan dalam kajian Darajat Wibawa ini didukung oleh Ashadi yang berpendapat bahwa tanggung jawab jurnalis adalah kemampuan untuk melakukan tugas atau tindakannya tanpa kewenangan penegakan hukum oleh atasannya, serta pembentukan dan penerapan kode etik semakin meningkat.¹⁹

¹⁷ Dr. Wahyu Wibowo, *Menuju Jurnalisme Beretika. Peran Bahasa, Bisnis, dan Politik di Era Mondial*. (Jakarta. PT.KOMPAS Media Nusantara, 2009) h.1-2

¹⁸ Drajat Wibawa, *Meraih Profesionalisme Wartawan, jurnal*, (UIN SGD Bandung: Mimbar vol. XXVIII, 2012), h,119

¹⁹ Ashadi Siregar, *Profesi Wartawan di Mata Saya*, (Yogyakarta: Hanindita Offse, 1985), h.45.

Selain menjadi seorang pencari berita terdapat beberapa tugas lainnya dari jurnalis, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Memberikan Informasi, Pendidik, dan Agen Pembaharu

Media berperan sebagai pemberi informasi lewat sejumlah hal, misalnya berita, feature, reportase, maupun karya-karya lainnya. Informasi tersebut dapat membawa dampak, mengubah pikiran bahkan menggerakkan masyarakat untuk melakukan sesuatu hal, baik itu positif atau negatif. Oleh sebab itu, seorang jurnalis harus menyajikan informasi dengan sifat mendidik dan bermanfaat. Hal itu berguna untuk meningkatkan nilai kehidupan pembacanya.

2. Memberi Hiburan Kepada Masyarakat

Selain menyampaikan informasi berupa pengetahuan, pekerjaan yang bergerak di bidang media ini juga dapat berperan untuk memberikan hiburan kepada masyarakat. Misalnya saja, menampilkan karya jurnalistik, contohnya feature atau komisi yang berisi mengenai kehidupan masyarakat sehari-hari.

3. Interpreter (Penafsir)

Tak semua peristiwa yang terjadi bisa secara langsung diserap dengan mudah oleh masyarakat. Oleh sebab itu, seorang jurnalis mempunyai tugas untuk menafsirkan dan menjelaskan arti dari peristiwa yang terjadi. Seperti, dengan analisis berita dalam reportase maupun komentar berita dalam tajuk rencana.

4. Wakil Publik dan Advokasi

Tugas jurnalis yang terakhir, yaitu membela kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, berita adalah sebuah produk jurnalistik yang wajib menjadi cerminan suara rakyat. Seorang wartawan dapat bertindak untuk mengkritisi kebijakan maupun tindakan pemerintah yang dipandang merugikan rakyat.

c. Keahlian

Keahlian adalah yang dimiliki seorang jurnalis dalam bidang jurnalistik, seperti Keterampilan menulis, fotografi, pelaporan. Dia menyebut jurnal Darajat Wibawa dalam buku hariannya. Kompetensi atau keahlian adalah suatu keahlian yang dimiliki seorang wartawan dibidang pencarian, pengolahan dan penyajian berita yang siap disebarluaskan kepada massa, dan tidak hanya itu saja, tetapi juga melalui usaha wartawan yang bersangkutan dunia mereka.²⁰

Pandangan pelapor majalah Darajat Wibawa bahwa keahlian adalah layanan unik dan esensial yang berfokus pada intelektual, yang merupakan pelatihan profesional jangka panjang untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis.

Tentunya ada beberapa skill dasar yang wajib Anda kuasai. Berikut adalah 4 (empat) kemampuan yang wajib dimiliki seorang jurnalis, diantaranya:

1. Komunikasi dan Wawasan Luas

Sebagai seorang jurnalis, Anda wajib memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dan wawasan yang luas. Pasalnya, Anda akan bertemu dengan banyak narasumber dari berbagai latar belakang dan melakukan wawancara dengannya sebagai sumber informasi berita Anda.

²⁰ Hikmat Kusuma Ningrat, dan Purnama Kusuma Ningrat, *Jurnalistik Teori Dan Praktik*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h.305.

2. *Writing/Skills*

Seorang jurnalis, juga dituntut untuk mempunyai kemampuan menulis khususnya menulis berita. Anda harus bisa menulis untuk berbagai media, baik itu media cetak seperti majalah dan media elektronik seperti televisi atau media digital.

3. *Up To Date* dengan Info Terkini

Seorang jurnalis tentu harus menjadi orang pertama yang paling tahu mengenai hal yang sedang ramai diperbincangkan masyarakat guna menggali informasi yang lebih lengkap lagi. Oleh karena itu, Anda harus selalu tanggap dengan segala peristiwa yang sedang terjadi di sekitar Anda.

4. *Attitude* yang baik

Salah satu hal yang mencerminkan jurnalis profesional, yaitu attitude. Seorang jurnalis harus mempunyai attitude yang baik, yakni menaati kode etik jurnalistik dan memahami etika dalam melaporkan sebuah berita.

d. Jurnalis

Jurnalis adalah orang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan kegiatan jurnalistik seperti menulis, menganalisis, dan secara teratur melaporkan kepada publik semua peristiwa melalui media massa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jurnalis adalah orang yang bekerja mengumpulkan dan menulis berita baik di media massa cetak maupun elektronik. Aktivitas jurnalistik tidak hanya meluas ke surat kabar, majalah, tetapi juga ke media online, yang merupakan bagian dari pekerjaan jurnalis. Jurnalisme yang

dituju adalah proses perolehan, pengumpulan, pelaporan, dan penulisan. Berita tersebut kemudian disebarluaskan melalui media massa cetak dan elektronik.²¹

Jurnalis yang bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan jurnalistik, contohnya menulis, menganalisis, dan melaporkan segala suatu peristiwa kepada publik melalui media massa secara teratur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jurnalis diartikan sebagai orang yang bekerja mengumpulkan dan menulis pemberitaan baik itu di media massa cetak maupun media massa elektronik. Jadi, kegiatan jurnalistik tak terbatas pada koran, majalah saja, tetapi juga pada media online yang menjadi salah satu ranah pekerjaan dari seorang jurnalis. kegiatan jurnalistik yang dimaksudkan yaitu proses pencaharian, pengumpulan, peliputan, dan penulisan. Kemudian, berita akan disebarluaskan melalui media massa cetak maupun elektronik.

Contohnya, artikel yang seringkali Anda baca. Dimana, artikel tersebut merupakan hasil kerja dari jurnalis. Jurnalis sering dianggap wakil dari suara masyarakat tentang segala sesuatu peristiwa. Oleh karena itu, seorang jurnalis harus memberikan berita secara aktual mungkin. Seorang jurnalis umumnya dibantu oleh editor untuk mengedit dan meng akurasi berita yang masuk. Hal itu tujuannya supaya isi dari berita tetap terjaga kualitasnya. Selain itu, mudah dibaca dan dipahami oleh audiens.

²¹ <https://www.gramedia.com/literasi/jurnalis/> (diakses tanggal 21 oktober, 2022 pukul 22:10 WIT).

C. Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

a. Sejarah AJI

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) muncul sebagai perlawanan pers Indonesia terhadap tirani rezim Orde Baru. Pada 21 Juni 1994, Detik, Editor dan Tempo awalnya dilarang. Ketiganya dilarang karena melaporkan kritik terhadap pihak berwenang. Aksi represif ini memicu solidaritas dan perlawanan dari banyak kelompok, bahkan di banyak kota. Sejak itu, gerakan perlawanan terus mengkristal.

Akhirnya, pada 7 Agustus 1994, sekitar 100 wartawan dan kolumnis berkumpul di Sirnagari, Bogor. Pada hari itu mereka menandatangani Deklarasi Silnagari. Esensi pernyataan ini adalah menuntut pemenuhan hak publik atas informasi, menentang penindasan pers, menolak wadah kesatuan jurnalis, dan mengumumkan pembentukan AJI.²²

Pada masa Orde Baru, AJI masuk dalam daftar organisasi terlarang. Oleh karena itu, aktivitas organisasi ini bersifat underground. Roda organisasi ini dipimpin oleh 20 aktivis jurnalis. Struktur administrasi dan organisasi ditutup untuk menghindari tekanan dari aparat keamanan. Saat itu AJI memiliki kurang dari 200 jurnalis, sehingga sistem kerja yang terorganisir ini sangat efektif dalam memenuhi misi organisasi

b. Visi-Misi AJI

Sejak awal, AJI telah mengangkat tiga tema utama. Hal ini kemudian ditransformasikan menjadi program kerja yang mengintegrasikan isu gender dan

²² <https://aji.or.id/read/sejarah/1/sejarah-aliansi-jurnalis-independen.html> (diakses tanggal 21 Oktober, 2022 pukul 22:16 WIT).

perempuan. Untuk itu, AJI secara rutin melakukan berbagai kegiatan kampanye, advokasi, pelatihan, lokakarya, diskusi, seminar, penelitian, hibah dan peluncuran buku.²³

a) Pertama, perjuangan untuk melindungi kebebasan pers.

Perjuangan membela kebebasan pers merupakan pekerjaan rumah terpenting AJI hingga saat ini. Ancaman terhadap kebebasan pers ditandai dengan meningkatnya tuntutan pidana dan perdata terhadap pers pasca reformasi. Hal ini diperkuat dengan statistik insiden kekerasan terhadap jurnalis yang relatif tinggi, namun statistik jumlah insiden yang dipegang oleh AJI sangat fluktuatif.

Kebebasan pers pada umumnya dimaknai sebagai kebebasan yang diberikan oleh pemerintah dan masyarakat kepada pers karena sudah sewajarnya pemerintah dan masyarakat menjamin kebebasan pers dalam menjalankan fungsi dasarnya.

Di dalam Bab VII pasal 18 ayat 1 UU No. 40 tahun 1999 tentang pers hal tersebut juga dinyatakan dalam ungkapan “setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan pasal 4 ayat 2 dan 3 di penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta”.²⁴

b) Kedua, meningkatkan profesionalisme.

Bagi AJI, pers yang profesional merupakan prasyarat mutlak untuk membangun budaya pers yang sehat. Organisasi berita Indonesia dengan

²³ <https://aji.or.id/read/program-kerja.html> (diakses tanggal 21 oktober, 2022 pukul 22:27 WIT).

²⁴ Ibid, h.3-4

kualitas jurnalistik seperti itu diharapkan dapat menjadi salah satu pilar demokrasi. Salah satu program etika utama AJI adalah kampanye penolakan amplop dan hadiah dari pendukung. AJI juga menyelenggarakan Tes Keterampilan Jurnalis Nasional pertama pada Februari 2012 dan akan terus dilakukan di berbagai kota.

c) Ketiga, meningkatkan kesejahteraan jurnalis.

Topik kesejahteraan tentu menjadi topik hangat di media. Bagi AJI, kesadaran akan pentingnya topik ini dimulai setelah Kongres AJI 1997. Kongres ini diluncurkan untuk memberikan pertanyaan yang adil kepada wartawan terkait aspek ekonomi. Salah satu bentuknya adalah dengan mempromosikan serikat pekerja di semua media.

c. Undang-Undang Pers

Dalam penjelasan undang-undang pers No. 40 tahun 1999 tentang pers dijelaskan, bahwa pada pasal 28 undang-undang dasar 1945 disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers yang meliputi media cetak, elektronik, online dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.²⁵ Agar pers berfungsi secara maksimal sebagaimana diamankan pasal 28 undang-undang dasar 1945, maka perlu di bentuk undang-undang pers.

Fungsi itu diperlukan secara maksimal karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang

²⁵ Azwar, M,SI. *4 Pilar Jurnalistik, Pengetahuan Dasar Belajar Jurnalistik*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2018), h.39-40

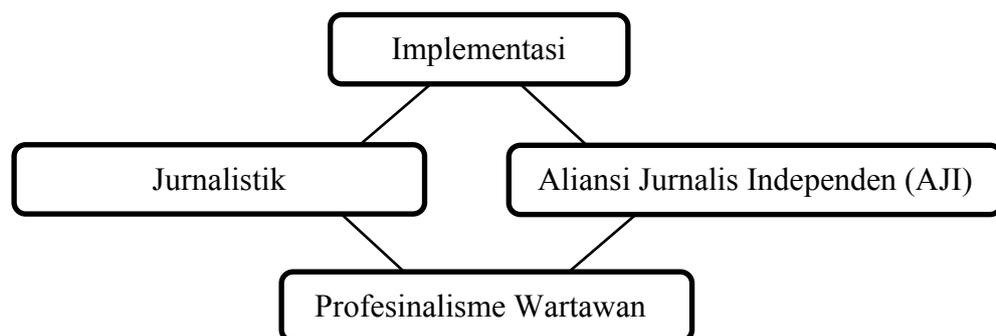
demokratis. Dalam kehidupan yang demokratis itu pertanggungjawaban kepada rakyat terjamin, system penyelenggaraan yang transparan berfungsi, serta keadilan dan kebenaran terwujud.

Pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan hak asasi manusia yang dijamin dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia NO. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia pasal 19 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dalam hal ini termaksud kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah.”

Pers juga melaksanakan control sosial sangat penting pula mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol masyarakat.

C. Kerangka Pikir



Tabel ini menggambarkan model empat elemen yang ada dalam pelaksanaan program yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program. Gambaran tersebut menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari empat unsur implementasi program. Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh *output* program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program. Empat Aliansi Jurnalis Independen menjadi salah satu organisasi wartawan yang paling aktif menjalankan fungsinya untuk mendukung, memelihara dan menjaga kemerdekaan pers sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 40 Tahun 1999.

